



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 17-A /KPTS/ I /2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN DRIVER KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Driver kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dalam mendukung aktivitas para Pejabat pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu ditunjuk Driver kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Driver Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841/025/2019 tanggal 10 Januari 2019 perihal Permohonan Penerbitan SK KDH.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Driver Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Driver sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan honorarium setiap bulan atas pelaksanaan tugasnya dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2019

| PEJABAT | PARAF |
|-----------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko |  |
| Kabag Umum & Perlengkapan |  |
| Kabag Hukum & Orgs |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 17-A /KPTS/ I /2019
 TANGGAL 2 JANUARI 2019

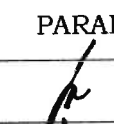

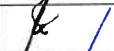

TENTANG : DAFTAR NAMA DRIVER KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH
 DAERAH PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH
 KAB. HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | NAMA | UNIT PEMAKAI KENDARAAN | NO POLISI DG-HB | BESAR HONORARIUM/ BULAN (RP) |
|----|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | WELLY LIOT | RT. BUPATI | 8001 | 1.500.000 |
| 2 | YONGKY KURATJI | RT. WAKIL BUPATI | 1010 | 1.500.000 |
| 3 | HUSEN SALASA | RT. WAKIL BUPATI | 1014 | 1.500.000 |
| 4 | WIN TEMPE | RT. SEKDA | 1020 | 1.500.000 |
| 5 | FANDY BARUTY | ASS. I | 1086 | 1.500.000 |
| 6 | EKMON SALEH | ASS II | 1038 | 1.500.000 |
| 7 | GALU ANDREAS | STAF AHLI | 1008 | 1.500.000 |
| 8 | MABUD MALIK | STAF AHLI | 1065 | 1.500.000 |
| 9 | KORES JUNAIDI | STAF AHLI | 1011 | 1.500.000 |
| 10 | AKBAR HAMISI | PEMERINTAHAN | 1025 | 1.500.000 |
| 11 | ARSYAD SYAWAL | HUKUM & ORGS | 1075 | 1.500.000 |
| 12 | MOSES A. BAWELE | ULP | 1121 | 1.500.000 |
| 13 | ABDUL HARIS PELLU | OPERASIONAL UMUM | 8003 | 1.500.000 |
| 14 | ANDARIAS PASUMA | BUS PEMDA | 1023 | 1.500.000 |
| 15 | M. SABRY PAPULING | OPERASIONAL UMUM | 1029 | 1.500.000 |
| 16 | RIZAL AYUB | OPERASIONAL UMUM | 29 | 1.500.000 |
| 17 | HIDAYAT HABSBY | OPERASIONAL UMUM | 1104 | 1.500.000 |
| 18 | RIDWAN SILITUBUN | OPERASIONAL UMUM | 1032 | 1.500.000 |
| 19 | RAFIT R. SAMAN | OPERASIONAL UMUM | 1021 | 1.500.000 |
| 20 | SAMSUL JAFAR | OPERASIONAL UMUM | 7000 | 1.500.000 |
| 21 | ZULFIKRAM MUHIDIN | OPERASIONAL UMUM | 1021 | 1.500.000 |
| 22 | SALMAN | OPERASIONAL UMUM | 1029 | 1.500.000 |
| 23 | FIRON SARANGATI | OPERASIONAL UMUM | | 1.500.000 |

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

| PEJABAT | PARAF |
|-----------------------------|---|
| Sekretaris Daerah |  |
| Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko |  |
| Kabag Umum & Perlengkapan |  |
| Kabag Hukum & Orgs |  |